



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);

26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas;
 - g. Catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 1.947.485.616.093,05	
b. Belanja	Rp 1.948.501.777.319,96	
Defisit		Rp 1.016.161.226,91
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 328.764.004.323,53	
- Pengeluaran	Rp 17.500.000.000,00	
Surplus		Rp 311.264.004.323,53

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 123.640.394.146,95 dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Anggaran pendapatan	Rp	2.071.126.010.240,00
	2. Realisasi	Rp	<u>1.947.485.616.093,05</u>
	Selisih kurang	Rp	123.640.394.146,95
b.	Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 459.790.027.593,57 dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Anggaran belanja	Rp	2.408.291.804.913,53
	2. Realisasi	Rp	<u>1.948.501.777.319,96</u>
	Selisih kurang	Rp	459.790.027.593,57
c.	Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp 336.149.633.446,62 dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Defisit	Rp	(337.165.794.673,53)
	2. Realisasi	Rp	<u>(1.016.161.226,91)</u>
	Selisih lebih	Rp	336.149.633.446,62
d.	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 27.523.625.000,00 dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp	356.287.629.323,53
	2. Realisasi	Rp	<u>328.764.004.323,53</u>
	Selisih	Rp	27.523.625.000,00
e.	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp	17.500.000.000,00
	2. Realisasi	Rp	<u>17.500.000.000,00</u>
	Selisih	Rp	0,00
f.	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 27.523.625.000,00 dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Anggaran pembiayaan netto	Rp	338.787.629.323,53
	2. Realisasi	Rp	<u>311.264.004.323,53</u>
	Selisih	Rp	27.523.625.000,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.	Saldo anggaran lebih awal	Rp	328.787.629.323,53
b.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	328.764.004.323,53
	Sub total (a - b)	Rp	23.625.000,00

c.	Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	310.247.843.096,62
	Sub total (a – b) + c	Rp	310.271.468.096,62
d.	Koreksi kesalahan pembukuan tahun Sebelumnya	Rp	(23.625.000,00)
e.	Lain-lain	Rp	0,00
f.	Saldo anggaran lebih akhir	Rp	310.247.843.096,62

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp	6.799.935.297.356,58
b.	Jumlah kewajiban	Rp	13.911.474.696,51
c.	Jumlah ekuitas	Rp	6.786.023.822.660,07

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.	Pendapatan - LO	Rp	2.056.241.358.141,60
b.	Beban	Rp	1.903.739.649.850,84
	Surplus dari operasi (a – b)	Rp	152.501.708.290,76
c.	Surplus dari kegiatan non operasional	Rp	135.933.781,00
	Surplus sebelum pos luar biasa [(a – b) + c]	Rp	152.637.642.071,76
d.	Pos luar biasa	Rp	279.498.128,00
	Surplus – LO [(a – b) + c] - d	Rp	152.358.143.943,76

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2015	Rp	328.759.328.958,53
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	286.441.634.789,09
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(287.457.796.016,00)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	(17.500.000.000,00)
e.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	4.415.565,00
f.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	387.844.499,00
g.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	21.299.000,00
h.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2015	Rp	310.656.726.795,62

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.	Ekuitas awal	Rp	7.875.534.768.261,34
b.	RK (K) PPKD	Rp	0,00
c.	Surplus / defisit – LO	Rp	152.358.143.943,76
d.	RK (M) PPKD 2014	Rp	0,00
e.	Dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar	Rp	(1.241.869.089.545,03)
	- Perhitungan mutasi masuk dan keluar aset tetap	Rp	222.520.529.999,14
	- Koreksi tambah dan koreksi kurang aset tetap	Rp	290.315.713.685,03
	- Penyesuaian/pembayaran utang jangka pendek	Rp	(27.772.509,20)
	- Koreksi tambah piutang/ tuntutan ganti rugi	Rp	1.393.787.988,18
	- Koreksi kurang piutang/ tuntutan ganti rugi	Rp	(2.078.998.701,00)
	- Koreksi nilai penyisihan piutang	Rp	4.507.081.913,26
	- Koreksi nilai investasi/ belanja dibayar dimuka	Rp	(16.828.408.422,48)
	- Perhitungan mutasi masuk dan keluar aset lainnya	Rp	(5.465.000,00)
	- Penghapusan aset tetap dan aset lainnya tahun 2015	Rp	(3.601.311.283,00)
	- Penyesuaian/akumulasi aset tetap s/d 2014	Rp	(1.736.105.199.525,46)
	- Penyesuaian/akumulasi amortisasi aset tak berwujud	Rp	(1.927.001.649,00)
	- Penyesuaian atas pendapatan ditangguhkan	Rp	(32.046.040,50)
f.	Ekuitas akhir	Rp	6.786.023.822.660,07

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- b. Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- c. Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- d. Lampiran II : Neraca
- e. Lampiran III : Laporan arus kas
- f. Lampiran IV : Laporan operasional
- g. Lampiran V : Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan Kinerja, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- b. Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

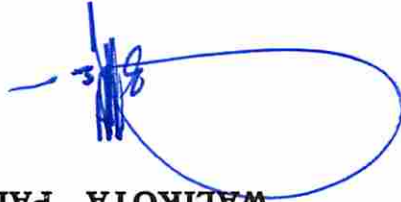
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI



Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Agustus
2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



VIDAL TRIZA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT :
(4/2016)

NO.	NAMA	KEBAHAN	TGL. PARAF
1	VIDAL TRIZA	Pt. Sahal	20/8-16
2	Com's	As	30.8.16
3	Stafmanor	Agg. Hk.	30/8.16
4	Stafmanor	Ka. Hk.	30/8-16
5	Stafmanor	Stafmanor	30/8/16

PEMERINTAH KOTA PADANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	402.035.190.681,00	370.413.732.165,05	(31.621.458.515,95)	92,13
1.1.1	Pajak Daerah	241.501.000.000,00	232.870.240.318,00	(8.630.759.682,00)	96,43
1.1.2	Restribusi Daerah	64.351.280.385,00	50.512.577.718,00	(13.838.702.667,00)	78,50
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.863.787.190,00	15.352.567.191,00	(511.219.999,00)	96,78
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	80.319.123.106,00	71.678.346.938,05	(8.640.776.167,95)	89,24
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.651.810.394.559,00	1.549.484.227.508,00	(102.326.167.051,00)	93,81
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.194.011.610.559,00	1.169.080.233.009,00	(24.931.377.550,00)	97,91
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	68.900.922.500,00	44.774.572.300,00	(24.126.350.200,00)	64,98
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya Alam)	2.654.943.059,00	1.849.915.709,00	(805.027.350,00)	69,68
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.072.429.395.000,00	1.072.429.395.000,00	-	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	50.026.350.000,00	50.026.350.000,00	-	100,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	356.066.451.000,00	284.853.161.000,00	(71.213.290.000,00)	80,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	356.066.451.000,00	284.853.161.000,00	(71.213.290.000,00)	80,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	101.732.333.000,00	95.550.833.499,00	(6.181.499.501,00)	93,92
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	101.732.333.000,00	95.550.833.499,00	(6.181.499.501,00)	93,92
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	17.280.425.000,00	27.587.656.420,00	10.307.231.420,00	159,65
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.353.800.000,00	14.661.031.420,00	10.307.231.420,00	336,74
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	12.926.625.000,00	12.926.625.000,00	-	100,00
	Jumlah	2.071.126.010.240,00	1.947.485.616.093,05	(123.640.394.146,95)	94,03
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI	2.033.200.572.431,51	1.660.520.699.769,96	(372.679.872.661,55)	81,67
2.1.1	Belanja Pegawai	1.404.012.072.734,07	1.138.041.803.167,00	(265.970.269.567,07)	81,06
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	588.815.373.943,44	496.335.266.602,96	(92.480.107.340,48)	84,29
2.1.4	Belanja Bunga	2.062.500.000,00	1.249.605.000,00	(812.895.000,00)	60,59
2.1.5	Belanja Hibah	26.750.232.000,00	18.873.698.000,00	(7.876.534.000,00)	70,56
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.622.084.650,00	437.460.000,00	(5.184.624.650,00)	7,78
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	5.938.309.104,00	5.582.867.000,00	(355.442.104,00)	94,01
2.2	BELANJA MODAL	374.091.232.482,02	287.576.579.422,00	(86.514.653.060,02)	76,87
2.2.1	Belanja Tanah	47.454.789.358,52	41.328.082.890,00	(6.126.706.468,52)	87,09
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	56.112.759.474,00	52.740.062.067,00	(3.372.697.407,00)	93,99
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	158.629.860.126,70	109.637.955.862,00	(48.991.904.264,70)	69,12
2.2.4	Belanja Jalan, Ingsi dan Jaringan	107.739.995.122,80	80.605.112.603,00	(27.134.882.519,80)	74,81
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.028.929.900,00	2.011.531.000,00	(17.398.900,00)	99,14
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	2.124.898.500,00	1.253.835.000,00	(871.063.500,00)	58,97
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	404.498.128,00	(595.501.872,00)	40,45
2.3.1	Belanja Tidak terduga	1.000.000.000,00	404.498.128,00	(595.501.872,00)	40,45
	Jumlah	2.408.291.804.913,53	1.948.501.777.319,96	(459.790.027.593,57)	80,91
2.4	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	
	Defisit	(337.165.794.673,53)	(1.016.161.226,91)	(337.165.794.673,53)	0,30
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	356.287.629.323,53	328.764.004.323,53	(27.523.625.000,00)	92,27
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	328.787.629.323,53	328.764.004.323,53	(23.625.000,00)	99,99
3.1.2	Perkemanaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	27.500.000.000,00	-	(27.500.000.000,00)	-
	Jumlah	356.287.629.323,53	328.764.004.323,53	(27.523.625.000,00)	92,27
3.2	PENGELUARAN DAERAH	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	-	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	-	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
	Jumlah	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	-	100,00
3.3	Sisa Lebih Pembinaan Anggaran (SILPA)	1.621.934.650,00	310.247.843.096,62	(1.311.686.806,38)	19,18

NO.	NAMA	JABATAN	TGL. PARAF
1	VIDAL TRIZA	Pdt. Pemb. Agama	20/8/16
2	Comsi	As	20.8.16
3	Sekelma	Kab. Hk.	20/8/16
4	Yahel	Ka. gmn	30/8/16
5	Stulerul Sr.	Kabid. Aet	20/8/2016

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

KOTA PADANG
 DAFTAR PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

No	Uraian rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang (Rp.)	Saldo Awal Piutang (Rp.)	Penambahan Piutang (Rp.)	Pengurangan Piutang (Rp.)	Saldo Akhir piutang (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	PAJAK		173.443.160.200,00	26.634.758.040,00	13.333.193.464,00	186.744.724.776,00
2	RETRIBUSI		5.409.768.699,00	3.275.385.393,00	2.497.968.226,00	6.187.185.866,00
3	BAGIAN LANCAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN		0,00	0,00	0,00	-
4	PIUTANG LAINNYA		17.759.930.530,00	11.426.765.801,00	12.266.780.745,00	16.919.915.586,00
5	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK		0,00	0,00	118.282.101.900,23	(118.282.101.900,23)
6	PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI		0,00	0,00	4.096.726.681,18	(4.096.726.681,18)
7	PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA		0,00	0,00	432.356.325,00	(432.356.325,00)
	Jumlah		196.612.859.429,00	41.336.909.234,00	150.909.127.341,41	87.040.641.321,59

No.	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	VIDAL TRIZA	PH Sehd	30/8-16	[Signature]
2	Com.S	As	30/8.16	[Signature]
3	[Signature]	Kabg. Hk	30/8.16	[Signature]
4	[Signature]	Ku BP	30/8-16	[Signature]
5	Systeml Sy.	Kabid. Auct	30/8/2016	[Signature]


WALIKOTA PADANG,

 MAHYELDI

KOTA PADANG
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan modal	Bentuk Penyertaan Modal (investasi) Daerah	Jumlah penyertaan modal daerah (Rp.)	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai awal tahun (Rp.)	Penyertaan Modal Tahun ini (Rp.)	Pengurang Penyertaan Modal Tahun Ini (Rp.)	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini (Rp.)	Sisa Modal tahun ini yang belum disertakan (Rp.)	Hasil Penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini (Rp.)	Jumlah Modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini (Rp.)	Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dgn tahun ini (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= 7 + 8 - 9	11 = 6 - 10	12	13	14 = 10 - 12
1	1972	Bank Nagari		Setoran dana		54.720.000.000,43	10.000.000.000,00	-	64.720.000.000,43				
2	-	PT. Pembangunan Sumbar		Setoran dana		17.450.000,00	-	-	17.450.000,00				
3	-	PT. Sarana Andalas Agung		Setoran dana		13.000.000,00	-	-	13.000.000,00				
4	-	PT. Melati Bus Antar Kota		Setoran dana		15.000.000,00	-	-	15.000.000,00				
5	1997	PT. Andalas Tuah Sakato		Setoran dana		52.000.000,00	-	-	52.000.000,00				
6	-	Kadin		Setoran dana		50.000.000,00	-	-	50.000.000,00				
7	1996	PT. Padang Puskud Bina Satwa		Setoran dana		50.000.000,00	-	-	50.000.000,00				
8	-	PDAM Kota Padang		Setoran dana		20.445.688.228,43	7.500.000.000,00	-	27.945.688.228,43				
9	2008	Balairung Sumatera Barat		Setoran dana		2.824.899.000,00	-	-	2.824.899.000,00				
10	-	Dana Bergulir				3.514.150.000,00	-	-	3.514.150.000,00				
		Penyisihan Dana Bergulir							(2.619.148.880,00)				
		JUMLAH				81.702.187.228,86	17.500.000.000,00	-	96.583.038.348,86				

No.	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	VIDAL TRIA	Plt. Sekda	30/8-16	[Signature]
2	Com. I	As	30.8.16	[Signature]
3	Sudhono	Kab. HR.	30/8/16	[Signature]
4	Syahrul	Ku. B. R.	30/8/16	[Signature]
5	Syahrul Sy.	Kabid. Alet	30/8/16	[Signature]






WALIKOTA PADANG,

 MAHYELDI

KOTA PADANG
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

No	Uraian	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Tanah	3.939.371.803.449,33	242.452.052.640,00	182.245.326.800,00	3.999.578.529.289,33
2	Peralatan dan Mesin	469.575.123.486,56	79.089.624.250,00	7.926.697.613,25	540.738.050.123,31
3	Gedung dan Bangunan	1.402.521.981.363,70	157.251.694.858,86	79.288.369.155,16	1.480.485.307.067,40
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.430.392.762.768,49	696.134.556.988,38	61.432.529.181,58	2.065.094.790.575,29
5	Aset Tetap Lainnya	62.491.366.415,80	19.111.976.577,13	1.001.367.837,00	80.601.975.155,93
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	19.311.838.354,10	28.824.521.743,70	7.318.317.430,00	40.818.042.667,80
7	Akumulasi Penyusutan	-	-	1.972.934.129.617,72	(1.972.934.129.617,72)
	JUMLAH	7.323.664.875.837,98	1.222.864.427.058,07	2.312.146.737.634,71	6.234.382.565.261,34

WALIKOTA PADANG,


 MAHYELDI

No.	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	VIDAR TRISA	Ptt Sekda	30/8-16	
2	Com.S	As	30.8.16	
3	Rydhwan	Kabg. HK.	30/8.16	
4	Mahdi	Ka A/P	30/8-16	
5	Stafrel Sy.	Kabid. Auct	30/8/2016	

KOTA PADANG
 DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	Uraian Aset	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Tuntutan Ganti Rugi	194.927.014,50	163.354.815,50	-	358.281.830,00
2	Tuntutan Perbendaharaan	200.849.142,00	-	-	200.849.142,00
3	Aset Tak Berwujud	3.600.864.095,00	-	886.054.068,00	2.714.810.027,00
4	Aset Lain-lain	9.403.217.586,00	2.473.048.060,00	56.436.364,00	11.819.829.282,00
5	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	54.809.026.000,00	-	497.000.000,00	54.312.026.000,00
	Jumlah	68.208.883.837,50	2.636.402.875,50	1.439.490.432,00	69.405.796.281,00

WALIKOTA PADANG,


 MAHYELDI

No.	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	VIDAL TRIA	PTT Sekda	20/8-16	7
2	Corri S	As	20.8.16	8
3	Ahmad	Kab. HK	30/8.16	9
4	Agus	Kec. G.11C	30/8-16	10
5	Spesial Sy.	Kabid. Aset	30/8/2016	11

KOTA PADANG
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2015

No	Kode Kegiatan	SKPD	Jumlah Realisasi Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015			Jumlah Akumulasi Realisasi s.d Akhir Tahun 2015 (Rp.) 7 = (4+5+6)	Jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Berikutnya (Rp.) 8
			Realisasi Tahun 2013 (Rp.) 4	Realisasi Tahun 2014 (Rp.) 5	Realisasi Tahun 2015 (Rp.) 6		
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)	8
1	Pengadaan alat praktek dan peraga sekolah (dana sharing Provinsi)	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	200.000.000,00
2	Pembangunan ruang kelas baru SD (dana sharing Provinsi)	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	390.000.000,00
3	Pembangunan ruang kelas baru SMP (dana sharing Provinsi)	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	450.000.000,00
4	Pengadaan buku perpustakaan SMP (dana sharing Provinsi)	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	200.000.000,00
5	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMA/SMK (dana sharing Provinsi)	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	400.000.000,00
6	Pengadaan paket kegiatan sistem pembelajaran elektronik sekolah SMA (dana sharing Provinsi)	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	555.000.000,00
7	Sekolah Piloting Pendidikan karakter SD (dana sharing Provinsi)	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	50.000.000,00
8	Sekolah Piloting Pendidikan karakter SMP (dana sharing Provinsi)	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	50.000.000,00
9	Peningkatan Jalan (bantuan keuangan bersifat khusus Provinsi)	Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	-	1.427.500.000,00
10	Peningkatan Jembatan (bantuan keuangan bersifat khusus Provinsi)	Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	-	950.000.000,00
11	Rehabilitasi/perbaiki saluran drainase (bantuan keuangan bersifat khusus Provinsi tahun 2015)	Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	-	2.850.000.000,00

No	Kode Kegiatan	SKPD	Jumlah Realisasi Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015			Jumlah Akumulasi Realisasi s.d Akhir Tahun 2015 (Rp.) 7 = (4+5+6)	Jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Berikutnya (Rp.) 8
			Realisasi Tahun 2013 (Rp.) 4	Realisasi Tahun 2014 (Rp.) 5	Realisasi Tahun 2015 (Rp.) 6		
12	Peningkatan dan Rehabilitasi prasarana, sarana dan utilitas lingkungan (bantuan keuangan bersifat khusus Provinsi tahun 2015)	Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	-	4.904.125.000,00
13	Pembangunan Lapau Panjang Cimpago Pantai Padang, Kecamatan Padang Barat (bantuan keuangan khusus dari Provinsi)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	-	500.000.000,00
14	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	-	3.745.000.000,00
15	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD	-	-	397.734.550,00	397.734.550,00	84.014.704.000,00
		Jumlah	-	-	397.734.550,00	397.734.550,00	100.686.329.000,00

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

No.	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	Vitoria	Pf. Sekda	31/8/16	/
2	Comel	AB	30.8.16	/
3	Gubirwa	Kab. HK.	30/8/16	/
4	Ryaler	Kec. gsc	30/8/16	/
5	Syulend Sy.	Kabid. Auct	30/8/16	/

PEMERINTAH KOTA PADANG
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar Hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Umum Daerah (Rp)	Transfer ke Kas Umum Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa dana yang belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N I H I L								
	Jumlah		-	-	-	-	-	-

WALIKOTA PADANG,

NO.	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	VIDAL TRI DA	PH Sehera	30-16	✓
2	Com. S	A3	30.8.16	✓
3	Fuhman	Labg. Hk.	30/0.16	✓
4	Gyatar	Ku. Gidur	30/0-16	✓
5	Syulend sy.	Labid. Met	30/0/16	✓



MAHYELDI

PEMERINTAH KOTA PADANG
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN 111 :
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR 4 TAHUN 2016
 TENTANG PERRYANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

No	Sumber pinjaman daerah	Dasar hukum pinjaman/ Obligasi	Tanggal/Tahun perjanjian pinjaman/ obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal obligasi (Rp)	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini		Jumlah Sisa pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

No.	NAMA	PROVINSI	TGL	PARAF
1	VDM TRITA	HK Selab	30-10	P
2	Com.S	AS	30.8.16	P
3	Ryerson	Kab. HK.	30.16	P
4	G.M.L.	Ka GN-	30-10	P
5	Sydical Sr.	Knd. Ane	30/8/2016	P.

WALIKOTA PADANG,
 MAHYELDI

No.	URAIAN	TAHUN 2015 (Rp.)	TAHUN 2014 (Rp.)
47	KEWAJIBAN		
48	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
49	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	387.584.699,00	-
50	Utang Bunga	-	-
51	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.957.131.242,20	2.978.173.268,00
52	Pendapatan Diterima Dimuka	39.000.000,00	-
53	Utang Belanja	-	-
54	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
55	Jmlh. Kewajiban Jk. Pendek	7.383.715.941,20	2.978.173.268,00
56	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
57	Utang Dalam Negeri	6.527.758.755,31	6.527.758.755,31
58	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
59	Jmlh. Kewajiban Jk. Panjang	6.527.758.755,31	6.527.758.755,31
60	JUMLAH KEWAJIBAN	13.911.474.696,51	9.505.932.023,31
61	EKUITAS DANA		
62	EKUITAS DANA LANCAR		
63	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	328.764.004.323,53
64	Pendapatan yang Ditangguhkan	-	69.283.040,50
65	Cadangan Piutang	-	72.410.024.458,51
66	Cadangan Persediaan	-	14.195.776.170,84
67	Dana yg hrs disediakan utk Pembayaran Utang Jk.Pendek	-	(2.978.173.268,00)
68	Jmlh. Ekuitas Dana Lancar	-	412.460.914.725,38
69	EKUITAS DANA INVESTASI		
70	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	77.727.852.615,79
71	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	-	7.323.664.875.837,98
72	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-	68.208.883.837,50
73	Dana yg hrs disediakan utk Pembayaran Utang Jk.Panjang	-	(6.527.758.755,31)
74	Jmlh. Ekuitas Dana Investasi	-	7.463.073.853.535,96
75	EKUITAS DANA CADANGAN		
76	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-
77	Jmlh. Ekuitas Dana Cadangan	-	-
78	JUMLAH EKUITAS DANA	-	7.875.534.768.261,34
79	EKUITAS		
80	Ekuitas	6.786.023.822.660,07	-
	Jumlah Ekuitas	6.786.023.822.660,07	-
81	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	6.799.935.297.356,58	7.885.040.700.284,65


WALIKOTA PADANG,

No.	NAMA	JABATAN	TGL	PARA
1	VIDAL TRIANA	P/1 Sekda	30/8-16	17
2	Com.S	AS	30.18/16	17
3	Ahmadson	Kab. Hk	30/8.16	17
4	Ryand	Kca. 9/16	30/8-16	17
5	Syikal Sy.	Kabid. Auct	30/8/2016	17

MAHYELDI

Perolehan Aset Lainnya	2.016.224.500,00	650.036.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
Belanja Aset Lainnya		
Jumlah Arus Keluar Kas	287.593.729.797,00	273.164.115.317,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(287.457.796.016,00)	(272.581.265.317,00)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
1. ARUS MASUK KAS		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perush Negara	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perush Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemda Lainnya	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
2. ARUS KELUAR KAS		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	17.500.000.000,00	19.021.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Penerimaan Pusat	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemda Lainnya	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lemb. Keu. Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lemb. Keu. Bukan Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Obligasi	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lainnya	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Pemda Lainnya	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	17.500.000.000,00	19.021.000.000,00
Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan	(17.500.000.000,00)	(19.021.000.000,00)
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
1. ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	75.900.324.005,00	70.119.743.161,00
Penerimaan Setoran UP Tahun 2014 di Tahun 2015	4.675.365,00	971.784.496,00
Penerimaan Sisa UP/TU tahun Berjalan	5.242.531.042,00	6.125.706.813,00
Jumlah Arus Masuk Kas	81.147.530.412,00	77.217.234.470,00
2. ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	75.900.324.005,00	70.119.743.161,00
Pengeluaran UP Tahun 2015 yang masih berada di Bendahara Pengeluaran	259.800,00	4.675.365,00
Pengeluaran Sisa UP/TU Tahun Berjalan	5.242.531.042,00	6.125.706.813,00
Jumlah Arus Keluar Kas	81.143.114.847,00	76.250.125.339,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	4.415.565,00	967.109.131,00
Kenaikan/ Penurunan Kas	(18.511.745.661,91)	101.144.640.012,44
Saldo Awal Kas di BUD	328.759.328.958,53	227.638.313.946,09
Saldo Akhir Kas di BUD	310.247.583.296,62	328.759.328.958,53
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	387.844.499,00	28.300.365,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	21.299.000,00	69.283.040,50
Saldo Akhir Kas	310.656.726.795,62	328.856.912.364,03

No.	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	VIDAL TRIAN	Plt Sekda	30/8-16	[Signature]
2	Am.S	As	30/8/16	[Signature]
3	Syahrudin	Kab. Ke.	30/8/16	[Signature]
4	Syaiful	Kec. 911 -	30/8-16	[Signature]
5	Syaiful Sy.	Kabid. Aekt	30/8/2016	[Signature]

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI



PEMERINTAH KOTA PADANG
LAPORAN OPERASIONAL (LO)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

Lampiran IV.
Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015

No.	Uraian	Realisasi 2015 (Rp.)	Realisasi 2014 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan	%
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN				
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	248.825.184.809,00			
	Pendapatan Retribusi Daerah	51.320.610.885,00			
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	15.352.567.191,00			
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	71.507.836.958,55			
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	387.006.199.843,55	-	-	
B	PENDAPATAN TRANSFER				
	1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	44.774.572.300,00			
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.849.915.709,00			
	Dana Alokasi Umum	1.072.429.395.000,00			
	Dana Alokasi Khusus	50.026.350.000,00			
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.169.080.233.009,00	-	-	
	2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-			
	Dana Penyesuaian	284.853.161.000,00			
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	284.853.161.000,00	-	-	
	3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	94.712.297.713,00			
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-			
	Jumlah Pendapatan Transfer Dari Provinsi	94.712.297.713,00	-	-	
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.548.645.691.722,00	-	-	
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	14.661.031.420,00			
	Pendapatan Hibah Barang/Aset	93.001.810.156,05			
	Pendapatan Dana Darurat	-			
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	12.926.625.000,00			
	Pendapatan Lainnya	-			
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	120.589.466.576,05	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.056.241.358.141,60	-	-	
II	BEBAN				
	Beban Pegawai	1.138.069.364.022,00			
	Beban Persediaan	120.254.786.732,95			
	Beban Jasa	271.669.055.321,96			
	Beban Pemeliharaan	16.149.819.024,00			
	Beban Perjalanan Dinas	46.381.155.650,00			
	Beban Bunga	1.249.605.000,00			
	Beban Subsidi	-			
	Beban Hibah	65.448.458.415,00			
	Beban Bantuan Sosial	437.460.000,00			
	Beban Bantuan Keuangan	5.582.867.000,00			
	Beban Penyusutan	236.828.930.092,26			
	Beban Amortisasi	1.015.376.919,00			
	Beban Penyisihan Piutang	652.771.673,67			
	Beban Transfer	-			
	Beban Lain-lain	-			
	Jumlah Beban	1.903.739.649.850,84	-	-	
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	152.501.708.290,76	-	-	
III	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	135.933.781,00			
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-			
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	-			
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-			
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-			
	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	135.933.781,00	-	-	
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	152.637.642.071,76	-	-	
IV	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	-			
	Beban Luar Biasa	279.498.128,00			
	POS LUAR BIASA	279.498.128,00	-	-	
	SURPLUS/DEFISIT - LO	152.358.143.943,76	-	-	

1	VIZOR	PKA	PKA Sekolah	30/8/16	
2	Com.S	A3		30.8.16	
3	Syahrin			Kang. Hg. 30/8.16	
4	Syahrin / Ca BR			30/8/16	
5	Syahrin Sr.	Kabid. Mut		30/8/2016	

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI



Lampiran V.
Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH KOTA PADANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2015	2014
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	328.787.629.323,53	
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	328.764.004.323,53	
3.	Sub Total (1 - 2)	23.625.000,00	
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	310.247.843.096,62	
5.	Sub Total (3 + 4)	310.271.468.096,62	
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(23.625.000,00)	
7.	Lain-lain	-	
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	310.247.843.096,62	

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

No.	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	VIDAL DITA	Pjt Sekda	30/8-16	/
	Com.S	A2	30.8.16	/
	Andherson	Kabang. Atk.	22/8.16	/
4	Epahel	Ka BPC	30/8-16	/
5	Syikal Sy.	Labid. Atk	30/8/2016	/



PEMERINTAH KOTA PADANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

Lampiran VI
Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	2015	2014	Penambahan/ Pengurangan
1	2	3	4	5
1	EKUITAS AWAL	7.875.534.768.261,34		
2	RK (K) PPKD	-		
3	Surplus / Defisit - LO	152.358.143.943,76		
4	RK (M) PPKD 2014	-		
5	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar :	(1.241.869.089.545,03)		
	Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap	222.520.529.999,14		
	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Aset Tetap	290.315.713.685,03		
	Penyesuaian/Pembayaran Utang Jangka Pendek	(27.772.509,20)		
	Koreksi Tambah Piutang/Tuntutan Ganti Rugi	1.393.787.988,18		
	Koreksi Kurang Piutang/Tuntutan Ganti Rugi	(2.078.998.701,00)		
	Koreksi Nilai Penyisihan/ Piutang	4.507.081.913,26		
	Koreksi Nilai Investasi/Belanja dibayar dimuka	(16.828.408.422,48)		
	Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Lainnya	(5.465.000,00)		
	Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya tahun 2015	(3.601.311.283,00)		
	Penyesuaian/Akumulasi Penyusutan Aset Tetap s/d 2014	(1.736.105.199.525,46)		
	Penyesuaian/Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud s/d 2014	(1.927.001.649,00)		
	Penyesuaian atas pendapatan ditangguhkan	(32.046.040,50)		
6	EKUITAS AKHIR	6.786.023.822.660,07	-	

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

No	NAWA	LOKASI	TGL	PARA
1	VIDAL TRITA	PH Sebelah	30/8-16	17
2	Com.S	AS	30.8.16	17
3	Abdullah	Kab. Kt	30/8.16	9.
4	Syahrul	Ka. K. P. C.	30/8-11	17
5	Syahrul Sy.	Kabid. AKT	30/8/2016	17.

BAB VII PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang disajikan untuk menggambarkan kecukupan penerimaan periode berjalan dalam membiayai seluruh pengeluaran, memperlihatkan kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, menyajikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, menunjukkan bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kebutuhan kasnya, menjabarkan posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, serta membandingkan perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Padang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Kebijakan ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang baru dilaksanakan secara penuh pada tahun 2015 ini.

Demikian laporan keuangan ini disusun sesuai dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Kami menyadari dalam penyusunannya tidak terlepas dari kendala dan permasalahan yang dihadapi, namun kerja keras dan koordinasi telah dilakukan secara optimal dalam mempersiapkan data sehingga laporan keuangan ini dapat tersaji. Semoga laporan keuangan ini dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

No.	NAMA	JABAT	TANGGAL	STAMP
1	VIDAL TRISA Com. I	PKA Secha As	30/8-16	✓
	Syuhron	Kab. Hk.	30.8.16	✓
4	Syuhron	Kab. Hk.	30/8-16	✓
5	Syuhron Sr.	Kabid. Aikt	30/8/2016	✓